

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu untuk menciptakan kesempatan kerja yaitu mengatur dan menyediakan kesempatan kerja yang merata bagi seluruh warga Negara sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 “bahwasanya tiap-tiap Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, (Undang-Undang Dasar 1945).

Negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar 237.641.326 jiwa menjadi salah satu masalah utama adalah pembangunan secara merata. Masalah ini disebabkan karena struktur ekonomi yang masih belum mampu menciptakan kesempatan lapangan kerja yang sesuai dan dalam jumlah cukup untuk menyerap angkatan kerja yang ada. Masalah pengangguran seperti ini hanya mungkin dipecahkan dengan pembangunan nasional yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui penciptaan kesempatan kerja dan pembangunan tenaga kerja secara tepat asas dan memadai. (Suroto, 1992:11)

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi sehingga dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan

peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat di suatu tahap ke tahap berikutnya (Arsyad, 1997:11).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999:108).

Hampir semua negara cenderung mengutamakan sektor industri contohnya Jepang, Cina, Amerika, dll. Sektor industri dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga dengan keunggulan sektor industri akan didapat nilai tambah yang tinggi yang pada akhirnya tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat terwujud.

Industri merupakan suatu usaha manusia dalam menggabungkan mengolah bahan-bahan dari sumberdaya lingkungan menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia. Industrialisasi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu masyarakat dan bangsa secara keseluruhan untuk memproduksi aneka rupa barang kebutuhan masyarakat. Industrialisasi membantu masyarakat dalam memperoleh penghasilan dan telah merangsang penduduk untuk melepaskan cara hidup mereka yang berorientasi pada tradisi serta mendorong mereka untuk terhubung dengan dunia luar : (Selo Sumarjan, 1986).

Transformasi sektor ekonomi dari berbasis agraris menjadi perekonomian yang berbasis industri, menyebabkan sektor industri menjadi

leading sektor dalam perekonomian Indonesia yang diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh positif bagi sektor ekonomi lain dan juga permintaan tenaga kerja (Arsyad, 2004). Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB merupakan yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya, tetapi menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir yaitu 27,80 persen pada tahun 2008 dan 23,94 persen pada tahun 2012, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Distribusi Persentase PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (persen)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	14,50	15,30	15,29	14,70	14,44
2	Pertambangan dan Penggalian	10,90	10,60	11,16	11,85	11,78
3	Industri Pengolahan	27,80	26,40	24,80	24,33	23,94
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,80	0,80	0,76	0,77	0,79
5	Bangunan	8,50	9,90	10,25	10,16	10,45
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	14,00	13,30	13,69	13,80	13,90
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,30	6,30	6,56	6,62	6,66
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,40	7,20	7,24	7,21	7,26
9	Jasa-jasa	9,70	10,20	10,24	10,56	10,78
	PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Indonesia, 2013

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kemudian diikuti oleh sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan yang juga mengalami penurunan yakni 14,50 persen pada tahun 2008 menjadi 14,44 persen pada tahun 2012. selanjutnya sektor perdangan, hotel, dan restoran (PHR) yaitu sebesar 14,00 persen pada tahun 2008 dan 13,90 persen pada tahun 2012. meskipun pada tiap tahunnya mengalami penurunan namun kontribusi sektor industri pengolahan lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sehingga yang akan ditegaskan

dalam konteks ini bahwa sektor industri pengolahan di Indonesia berperan penting dalam perekonomian Indonesia.

Fenomena menurunnya kontribusi industri pengolahan ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena akan berimplikasi pada menurunnya peran sektor industri pengolahan salah satunya dalam menciptakan lapangan kerja. Penurunan kontribusi industri pengolahan akan mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran mengingat tenaga kerja Indonesia yang cukup banyak bergerak pada industri pengolahan tersebut. Kememperin (2011) menjelaskan hilirisasi industri pengolahan merupakan salah satu cara memecahkan persoalan ini. Pengembangan industri pengolahan akan berdampak pada penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya sekaligus pemerataan pembangunan.

Pembangunan sektor industri pengolahan hampir selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-negara sedang berkembang (NSB), hal ini karena sektor industri pengolahan dianggap sebagai sektor pemimpin (*the leading sektor*) yang mendorong perkembangan sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian. Pengalaman pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan Negara Sedang Berkembang menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian (Arsyad, 2004).

Disisi lain jika dilihat dari konteks permintaan tenaga kerja, sektor industri belum mampu melakukan permintaan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selama kurun waktu 2008 hingga 2012, permintaan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan yaitu 43,37 persen pada tahun 2008 menurun menjadi 41,20 persen tahun 2012, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,09 persen pada tahun

2008 meningkat menjadi 24,02 persen orang pada tahun 2012, jasa sosial 12,7 persen dan sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja sebesar 12,28 persen dan tahun 2012 mengalami peningkatan hanya 14,21 persen (Badan Pusat Statistik, 2013). Untuk lebih jelasnya keterangan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha (juta orang)

No	LAPANGAN PEKERJAAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	43,37	43,85	42,16	40,90	41,20
2	Pertambangan dan penggalihan	1,09	1,18	1,25	1,41	1,61
3	Industri pengolahan	12,28	12,55	13,43	14,12	14,21
4	Konstruksi	5,06	5,04	5,215	5,96	6,10
5	Perdagangan,hotel dan restoran	21,09	22,98	22,35	23,32	24,02
6	angkutan, pergudangan, dan komunikasi	6,17	6,10	5,72	5,33	5,20
7	Keuangan	1,42	1,46	1,69	2,34	2,78
8	jasa sosial	13,5	14,11	15,79	16,83	17,37
9	Lainnya	1,05	1,25	1,45	1,65	1,92

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Usaha memperluas kegiatan industri untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah unit usaha PDRB dan upah. Salah satu cara memperluas kegiatan industri adalah melalui pengembangan industri. Pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri besar dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah (Prabowo, 1997).

Mengenai tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya

alam dan faktor-faktor produksi. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Mengambil analisis makro Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku. PDRB menurut harga konstan adalah merupakan ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik, sebab perhitungan output barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Nainggolan, 2009)

Selain itu yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Yaitu peran pemerintah dalam meningkatkan tingkat upah, Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja (Simanjuntak, 2002)

Melihat fenomena permasalahan yang terjadi pada permintaan tenaga kerja maka diperlukan adanya pengembangan dan penguatan peran sektor industri pengolahan dalam permintaan tenaga kerja, permasalahan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun jumlah permintaan tenaga kerja industri pengolahan besar dan sedang pada tahun 2008 sebesar 2.666.564 jiwa. Kemudian mengalami penurunan tahun 2009 menjadi 2.466.095 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah permintaan tenaga kerja industri pengolahan besar dan sedang mengalami peningkatan sebesar 2.493.676 jiwa. Kemudian pada tahun 2011 meningkat sebesar 2.569.248 jiwa. Peningkatan tenaga kerja kembali terjadi di tahun 2012 yang mencapai angka 2.854.697 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2013).

permasalahan yang terjadi pada permintaan tenaga kerja industri pengolahan di Indonesia maka perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja pada industri pengolahan di Indonesia. Industri dimasa yang akan datang mampu memberikan percepatan dan perluasan industrialisasi di Indonesia, dengan keunggulan sektor industri pengolahan akan didapat nilai tambah yang tinggi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang luas yang pada akhirnya tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat terwujud Berdasarkan uraian sebelumnya maka penelitian ini diberi judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Indonesia Tahun 2008-2012”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan utama yang ingin dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah perusahaan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja industri pengolahan di Indonesia tahun 2008 2012?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja industri pengolahan di Indonesia tahun 2008-2012?
3. Apakah Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja industri pengolahan di Indonesia tahun 2008-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh Jumlah Perusahaan terhadap permintaan tenaga kerja industri pengolahan di Indonesia tahun 2008-2012
2. Mengatahui pengaruh PDRB terhadap permintaan tenaga kerja industri pengolahan di Indonesia tahun 2008-2012
3. Upah Minimum Provinsi terhadap permintaan tenaga kerja industri pengolahan di Indonesia tahun 2008-2012

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja industri pengolahan di Indonesia..
- 1.4.2 Praktis : Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan (pemerintah pusat) dalam perencanaan dan strategi yang tepat dalam pembangunan dan pengembangan serta peningkatan peranan industri terhadap perekonomian Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Penelitian ini akan menganalisis wilayah Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi. Data yang berkaitan dengan industri pengolahan dibatasi hanya untuk perusahaan yang tergolong Industri Besar dan Sedang (IBS) tanpa mengikutsertakan industri kecil karena keterbatasan data. Kategori industri besar sedang mengikuti klasifikasi BPS, yaitu suatu perusahaan industri dikatakan berskala sedang jika mempunyai

tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang dan berskala besar jika mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih.

1.6 Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi secara garis besar adalah sebagai berikut antara lain :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini secara ringkas memuat hal-hal yang mengantarkan kepada pokok permasalahan yang akan dibahas. Dimana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memulai uraian tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisa yang akan menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi analisis hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum dan obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai simpulan-simpulan dari pembahasan serta saran-saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.